



In partnership with
Canada



Menyongsong Kesiapan Daerah Menuju Net Sink FOLU: Kajian Kelayakan Pembayaran Berbasis Kinerja - Provinsi Sumatera Selatan

Penulis: PREE BRIN: Nurul Silva Lestari, I Wayan Susi Dharmawan, Wahyu Catur Adinugroho, Bondan Winarno, Donny Wicaksono, Anang Setiawan Achmadi
ICRAF: Tania Benita, Ira Ratna Sari, Anugerah Yuliadi, Arga Pandiwijaya, Azwar Najib Alhafi, Faza Iza Mahezs, Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi, Feri Johana, Andree Ekadinata, David Susanto

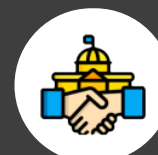
1 Latar Belakang

- Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak saat ini. Dampak perubahan iklim sudah terasa di seluruh dunia, dan diprediksi akan semakin parah di masa depan. **Mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi kunci untuk mengatasi perubahan iklim.**
- Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK atau Result-Based Payment/RBP) merupakan instrumen penting dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim.** PBK memberikan insentif finansial kepada negaranegara berkembang untuk melakukan aksi mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui pembayaran pada capaian penurunan emisi.
- Penting untuk memastikan bahwa **PBK hanya dialokasikan kepada daerah yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan.** Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan untuk menilai kesiapan suatu daerah dalam mengikuti skema PBK memilih jenis tanaman yang tepat, melakukan pembibitan agar tanaman tumbuh dan mudah dirawat.

2 Tujuan dan hasil yang diharapkan

Studi ini bertujuan untuk menilai kelayakan daerah dalam mengikuti skema PBK mitigasi perubahan iklim. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa PBK hanya dialokasikan kepada daerah yang memiliki potensi dan kapabilitas untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan.

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:



Pemerintah daerah – menentukan prioritas dan strategi serta memanfaatkan peluang pendanaan untuk aksi mitigasi perubahan iklim.



Pemerintah nasional – menilai potensi dan kesenjangan daerah sebagai acuan alokasi dukungan finansial dan nonfinansial dalam pengembangan dan pelaksanaan PBK di daerah.



Donor dan lembaga internasional – mengidentifikasi daerah yang telah siap dalam mengikuti skema PBK



Masyarakat – Masyarakat memperoleh informasi mengenai potensi dan peluang partisipasi dalam skema PBK.

3 Tahapan Studi

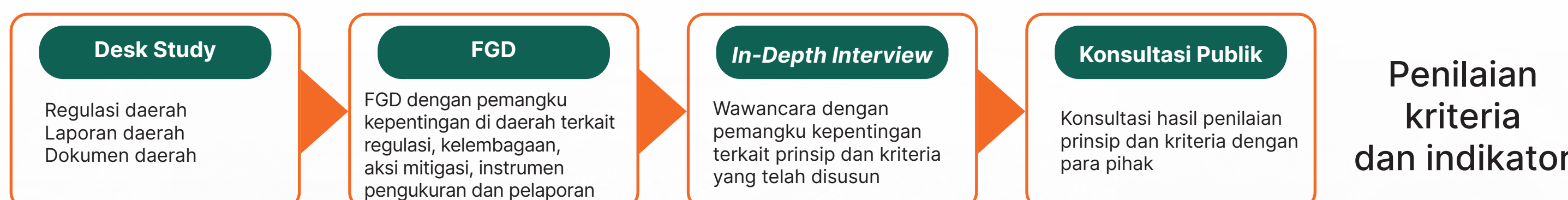
Kegiatan dilakukan bersama-sama secara kolaboratif dan partisipatif dengan pemangku kepentingan kunci di Provinsi Sumatera Selatan.



Penyusunan prinsip dan kriteria



Penilaian Kelayakan

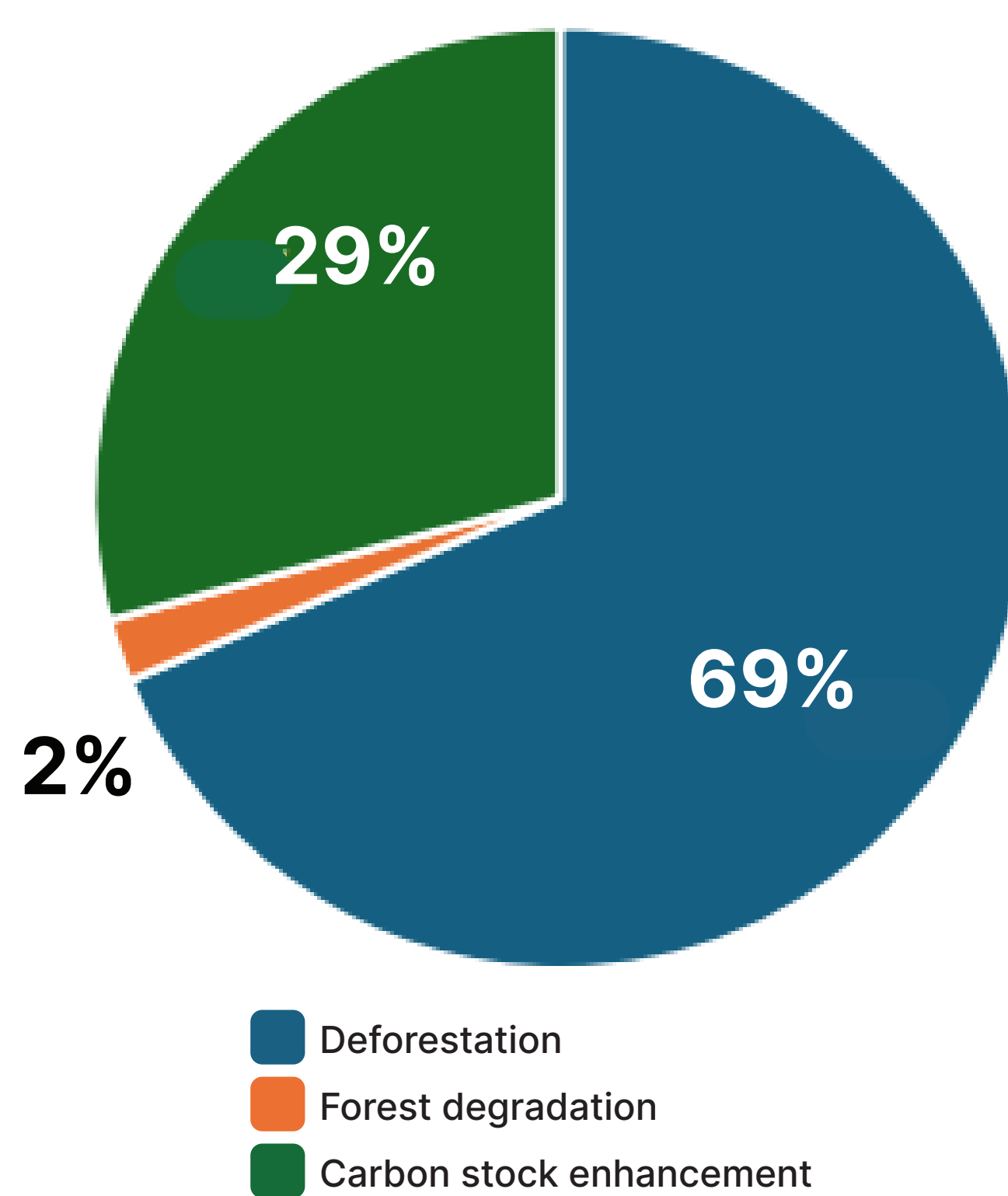


- Penyusunan kriteria dilakukan berdasarkan prinsip dasar pelaksanaan PBK di tingkat subnasional
- Penilaian kelayakan dilakukan pada setiap kriteria yang telah disusun menggunakan indikator penilaian dengan skala likert
- Hasil penyusunan prinsip dan kriteria, serta hasil penilaian kelayakan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan subnasional untuk memperoleh masukan yang digunakan dalam penyempurnaan laporan

Prinsip	Kriteria	Kondisi Ideal
Prinsip-1: Potensi penurunan emisi yang disertai kemampuan MMR	Kriteria 1-1: Potensi penurunan emisi GRK	1. Provinsi memiliki data emisi yang updated, akurat, dan kredibel 2. Dokumen RAD GRK dan SRAP yang updated 3. Potensi penurunan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan <i>baseline</i> emisi sub nasional
	Kriteria 1-2: Ketersediaan data aktivitas dan faktor emisi yang diperbarui secara berkala	1. Kemudahan mengakses data aktivitas dan peta tutupan lahan per tahun di tingkat provinsi 2. Ketersediaan data faktor emisi di tingkat provinsi
	Kriteria 1-3: Ketersediaan SDM yang mampu melaksanakan MMR	Tersedianya sistem pemantauan yang terintegrasi dari semua sektor berbasis lahan
	Kriteria 1-4: Kapasitas SDM yang mampu melaksanakan MMR	1. Kemampuan melakukan quality control dan assurance untuk data aktivitas, faktor emisi, dan inventarisasi GRK 2. Kemampuan analisis penginderaan jauh (GIS dan <i>remote sensing</i>) 3. Terdapat lembaga yang memiliki tupoksi dalam pengukuran dan pemantauan
Prinsip-2: Kapasitas Kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran	Kriteria 2-1: Komitmen pemerintah daerah	1. Terdapat komunikasi antara pemerintah daerah provinsi dengan KLHK yang menyatakan kesiapan provinsi dalam RBP 2. Terdapat dokumen perencanaan (GGP, RAD KSB, RPPEG, RAD TPB, Peta Jalan, Kehati, dsb) yang berkaitan dengan aksi mitigasi
	Kriteria 2-2: Keberadaan kelompok kerja (lembaga pengampu) multi pihak aksi mitigasi	Terdapat kelompok kerja multi pihak yang aktif berkegiatan
	Kriteria 2-3: Penganggaran aksi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Terdapat tagging pendanaan aksi mitigasi yang bersumber dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, NGO, swasta, dan perguruan tinggi 2. Integrasi aksi mitigasi ke dalam rencana pembangunan (RPJP/RPJM)
Prinsip-3: Kemampuan distribusi manfaat	Kriteria 3-1: Pemetaan penerima manfaat	Teridentifikasinya penerima manfaat dari provinsi sampai tingkat tapak
	Kriteria 3-2: Potensi menyiapkan mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana	Adanya pengalaman lembaga penyaluran dana (BPKAD) dalam mengelola dan menyalurkan dana di luar dana publik)
Prinsip-4: Keterlibatan masyarakat dan kerangka pengaman sosial	Kriteria 4-1: Manfaat ikutan (<i>co-benefit</i>) dari aksi mitigasi	1. Ketersediaan informasi dan/atau analisis manfaat jasa lingkungan dan sumber penghidupan 2. Regulasi di tingkat provinsi tentang pengelolaan jasa lingkungan
	Kriteria 4-2: Mekanisme aduan dan penyelesaian konflik	Ketersediaan saluran informasi, pengaduan, dan penyelesaian konflik
	Kriteria 4-3: Pengelolaan masyarakat adat (<i>indigenous people</i>)	Ketersediaan mekanisme penanganan dampak kegiatan terhadap masyarakat adat (<i>indigenous people</i>)
	Kriteria 4-4: Mekanisme GESI (<i>Gender Equality and Social Inclusion</i>)	Terdapat aksi mitigasi (program dan kegiatan) terkait GESI

Wilayah Kajian

Provinsi Sumatera Selatan : ± 8,705,373 ha (luas analisis spasial)



Perhitungan Baseline Emisi REDD+ Sumatera Selatan

	Emission/Removal	
DEFORESTATION	14.895.720	tCO2e/yr
Deforestation Emission - Biomass	5.488.561	tCO2e/yr
Non CO2 fire emission (in deforested area)	435.995	tCO2e/yr
Peat Decomposition Emission (in deforested area)	5.060.869	tCO2e/yr
Peat fire emission (in deforested area)	3.878.348	tCO2e/yr
Mangrove soil emissions (in deforested area)	31.948	tCO2e/yr

FOREST DEGRADATION	466.373	tCO2e/yr
Forest degradation emission - Biomass	421.526	tCO2e/yr
Non CO2 fire emission (in forest degraded area)	230	tCO2e/yr
Peat Decomposition Emission (in forest degraded area)	44.616	tCO2e/yr
Peat fire emission (in forest degraded area)	-	tCO2e/yr

ENHANCE OF FOREST CARBON STOCK	6.327.439	tCO2e/yr
Enhance of forest carbon stock (EFCS) - Biomass	(7.423.488)	tCO2e/yr
Peat Decomposition Emission (in EFCS area)	13.750.927	tCO2e/yr
Peat fire emission (in EFCS area)	4.359.674	tCO2e/yr

Total emission deforestation, forest degradation and EFCS	21.689.532	tCO2e/yr
---	------------	----------

- Dengan mempertimbangkan riwayat emisi tahunan, tingkat referensi emisi hutan dari sumber-sumber lain, emisi Sumatera Selatan diperkirakan sebesar 21,69 Mt CO2eq/tahun.
- Penyusunan skenario penurunan emisi antara tahun 2022-2032 dilakukan dengan menerapkan strategi, antara lain: mencegah deforestasi, penanaman kembali, peningkatan stok karbon, dan restorasi lahan gambut (termasuk pembasahan gambut).
- Strategi-strategi ini dibagi menjadi 16 intervensi dan dua skenario; Skenario Minimum menerapkan 6 intervensi, sedangkan Skenario Maksimum menerapkan semua intervensi.
- Berdasarkan referensi emisi, proyeksi penurunan emisi pada tahun 2022-2032, Skenario Minimum akan mengurangi 17,5 Mt CO2eq/tahun (pengurangan 80,47% dari *baseline*) dan Skenario Maksimum akan mengurangi 24,5 Mt CO2eq/tahun (pengurangan 113% dari *baseline*). Berdasarkan perhitungan ini, Sumatera Selatan diproyeksikan dapat menjadi net sequester pada tahun 2032.

4 Prinsip dan Kriteria

Metode studi ini dirancang untuk mengkaji kelayakan daerah dalam mengikuti PBK mitigasi perubahan iklim. Penilaian dilakukan berdasarkan empat **prinsip utama**:

- Prinsip-1:** Potensi penurunan emisi yang disertai kemampuan MMR
- Prinsip-2:** Kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran
- Prinsip-3:** Kemampuan distribusi manfaat secara adil
- Prinsip-4:** Keterlibatan masyarakat dan kerangka pengaman sosial

5 Skor Akhir Penilaian

- Skor akhir penilaian provinsi Sumatera Selatan adalah 3,5 yang termasuk dalam kategori 2 yaitu areal yurisdiksi yang dianalisis layak untuk ikut dalam PBK namun masih membutuhkan peningkatan kesiapan.
- Kekuatan utama Sumatera Selatan ada pada Prinsip-1 (75% dari nilai maksimum), karena potensi penurunan emisi yang cukup signifikan dari deforestasi dan restorasi ekosistem gambut. Didukung pula dengan modalitas dasar MMR yang telah dimiliki oleh stakeholder pengampu di tingkat provinsi.
- Kelemahan utama Sumatera Selatan ada pada Prinsip-3 (40% dari nilai maksimum), karena kapasitas terkait pengelolaan dan penyaluran dana, termasuk pembagian manfaat masih perlu ditingkatkan.
- Kesimpulan hasil studi kelayakan PBK adalah Sumatera Selatan LAYAK untuk ikut serta dalam mekanisme PBK, namun perlu menyiapkan penguatan regulasi, penguatan sistem kelembagaan, dan penguatan sumber daya manusia

6 Kesimpulan

- Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki berbagai modalities dalam rangka mensukseskan pencapaian target FOLU Net Sink provinsi dan NDC
- Terdapat berbagai peluang mekanisme keuangan pada tingkat global dan nasional dalam rangka mendukung implementasi NDC dan Nilai Ekonomi Karbon dengan pada saat yang sama berkorelasi dengan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat
- Perlu berbagai persiapan bagi Provinsi Sumatera Selatan terkait berbagai upaya kelembagaan dan kebijakan untuk menuju (1) pengukuran, pemantauan dan pelaporan (measurement, monitoring, reporting/MMR), (2) perencanaan dan penganggaran (3) pembagian manfaat (benefit sharing mechanism/BSM), (4) kerangka pengaman (safeguards)
- Perlunya kerja sama para pemangku kepentingan yang disertai komitmen daerah dalam mengakses berbagai peluang pendanaan yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah secara bersama sama.
- Dalam jangka dekat perlunya berbagai upaya peningkatan kapasitas berbagi unsur untuk mendukung dalam merumuskan strategi dan pemilihan mekanisme yang tepat untuk arah mendukung pembangunan berkelanjutan sektor FOLU di Sumatera Selatan

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id